

tajak

Peduli Lingkungan Hidup

Sepekan terakhir, bencana banjir dan tanah longsor kembali melanda sejumlah daerah di Tanah Air. Bencana hidrometeorologi itu telah mengakibatkan puluhan ribu rumah di berbagai kota/kabupaten di Pulau Jawa terendam air. Banjir juga telah menyebabkan kerusakan rumah warga dan berbagai sarana infrastruktur.

Bahkan, bencana tanah longsor yang terjadi di Purbalingga dan Brebes, Jawa Tengah, menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanah longsor di Purbalingga menyebabkan empat orang meninggal dunia. Sedangkan, tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Brebes, menyebabkan sembilan orang meninggal dunia dan 13 orang masih dinyatakan hilang.

Kita tentu sangat prihatin dan berbelasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang seakan tak pernah berhenti melanda negeri ini. Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin dan memastikan para korban bencana yang berada di pengungsian mendapatkan bantuan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tak hanya itu, para pengungsi, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang difabel juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang prima. Sebab, biasanya para korban bencana banjir dan tanah longsor selalu diserang berbagai jenis penyakit.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terus melanda wilayah Indonesia sudah seharusnya menuntut dan menggugah kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk mencintai alam dan lingkungan hidup. Menurut BNPB, pada awal 2018 saja, sudah terjadi 438 bencana.

Sebanyak 60 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi sepanjang Januari hingga Februari 2018. Tanah longsor tercatat sebagai bencana yang paling banyak menelan korban jiwa. Salah satu faktor penyebab bencana banjir dan tanah longsor adalah alam dan lingkungan di sekitar kita yang rusak.

Tahun 2018 adalah tahun pesta demokrasi dan tahun politik. Sebanyak 171 daerah di Tanah Air akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Inilah momentum bagi masyarakat Indonesia untuk memilih bupati, wali kota, gubernur yang memiliki kepedulian terhadap konservasi alam dan lingkungan hidup.

Saat ini, Indonesia membutuhkan para kepala daerah yang memiliki keberpihakan untuk menjaga dan merawat hutan, bukit, daerah aliran sungai, pantai, serta sumber daya alam lainnya. Dengan kepedulian terhadap kelestarian alam, para kepala daerah itu berarti telah melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana alam.

Masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pilkada serentak 2018 harus jeli memilih calon pemimpinnya. Tengoklah visi-misinya. Pastikan kandidat yang akan dipilih itu memiliki kepedulian dan keberpihakan pada pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Menjaga dan memelihara alam dan lingkungan hidup haruslah menjadi program unggulan yang ditawarkan para kandidat. Mengapa isu lingkungan hidup sangat penting? Sebab, laju kerusakan alam di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, laju kerusakan hutan rata-rata mencapai 750 ribu sampai dengan 1 juta hektare per tahun. Sementara, kemampuan pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan rata-rata maksimum 250 ribu hektare per tahun.

Tak cuma itu. Menurut Sutopo, fungsi sungai juga cenderung menurun. Daerah aliran sungai kritis dan luas lahan kritis di Indonesia sekitar 24,3 juta hektare. Belum lagi, alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan industri yang kerap kali mengabaikan aturan tata ruang yang berbasis bencana.

Para kepala daerah hendaknya meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab RA. Dalam sebuah kisah disebutkan, siang dan malam Umar mengkhidmatkan diri untuk rakyatnya. Tak hanya itu, sang pemimpin umat juga memikirkan kondisi unta-unta yang ada di wilayah kekuasaannya.

"Jika ada seekor unta mati karena disia-siakan tidak terurus, aku takut Allah meminta pertanggungjawaban kepadaku karena hal itu," kata Umar kepada Muawiyah bin Hudaib. Sejatinya, para kepala daerah akan diminta pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, termasuk kepeduliannya dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. ■

suarapublika

Ralat Foto

Pada Republika edisi Ahad [25/2] halaman 2 terjadi kesalahan penulisan keterangan foto. Tertulis Kapolri Tito Karnavian [kedua dari kiri] bersama Ketua PP Persatuan Islam Aceng Zakaria [kiri] pada acara Silaturahmi Akbar Persatuan Islam di Bandung. Seharusnya foto yang terpasang adalah foto ini. Demikian ralat foto



Tahun 2017 yang telah berlalu merupakan tahun yang tidak terlalu menggembirakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai angka lima persen pada tahun lalu sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di dunia, angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Ekonom yang juga mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menilai, ekonomi Indonesia saat ini sedang dilanda stagnasi, setelah pertumbuhan yang kuat akibat kenaikan harga komoditas pascakrisis keuangan global 2008.

Masih menurut Chatib, stagnasi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir yang tidak mampu menyentuh angka enam persen di khawatirkan akan membuat Indonesia terjebak sebagai negara pendapatan menengah dan tidak mampu naik kelas menjadi negara kaya, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Selain stagnasi pertumbuhan ekonomi, ada sejumlah faktor yang menjadikan pemerintah dan para ekonom harus bekerja ekstra keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam.

Studi yang dilakukan Raden Pardede dan Shirin Zahro dari C'Reco Research Institute memotret secara komprehensif kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Studi yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies itu menyebutkan, ada sejumlah fenomena menarik yang mewarnai perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 yang lalu.

Pertama, adanya penurunan penjualan gerai ritel. Isu penurunan penjualan di sejumlah gerai ritel di kota-kota besar hingga tutupnya sejumlah gerai ritel tersebut sempat menjadi polemik di tingkat nasional.

Selain adanya dugaan terjadi perlambatan konsumsi di masyarakat, penutupan gerai ritel tentu merupakan pukulan bagi pemerintah yang tengah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan.

Tanpa tambahan dana seperti saat masa amnesti pajak, penutupan gerai ritel besar di kota-kota utama Indonesia adalah peringatan bagi kebijakan fiskal negara.

Kedua, konsumsi rumah sebagai pe-

nyumbang utama PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang stagnan. Artinya, tidak ada pertumbuhan konsumsi yang signifikan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Bahkan tidak pada saat momentum Idul Fitri yang biasanya ditandai dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Meskipun faktor makroekonomi, seperti penurunan pengangguran (dari 5,61 persen menjadi 5,33 persen), penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia hingga mencapai 4,25 persen, dan kenaikan upah riil hingga 14 persen sepanjang 2017 disertai indeks kepercayaan konsumen yang tinggi pada tingkat 110,3 poin, tapi konsumsi rumah tangga tetap tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sebagaimana diharapkan.

Sejumlah faktor seperti pengalihan pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan tamasya dan jasa serta moda transaksi yang berbasis daring dianggap sebagai sejumlah faktor penyebab perlambatan konsumsi masyarakat.

Ketiga, di saat bersamaan, ada fenomena baik masyarakat golongan kaya maupun miskin sama-sama menahan diri melakukan konsumsi, meskipun dengan alasan berbeda.

Golongan kaya menahan konsumsi kebutuhan pokok dan mengeluarkan konsumsi lebih banyak untuk bertamasya dan membeli barang mewah, dengan mayoritas pendapatannya disimpan pada tabungan atau instrumen keuangan atau berinvestasi.

Sementara golongan miskin—mengingat mayoritas bekerja di sektor informal—maka upah riil mereka menurun dan pendapatan mereka habis untuk keperluan sehari-hari serta membayar tagihan. Misalnya, tagihan listrik yang mengalami kenaikan, sehingga semakin menggerus pendapatan mereka dan mengurangi konsumsi.

Keempat, ketika golongan miskin tidak mampu berkonsumsi karena kelemahan daya beli, golongan kaya dengan daya beli yang kuat justru lebih banyak menabung dan menahan investasinya.

Hal ini terlihat dari indikator pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang lebih cepat daripada pertumbuhan kredit meskipun suku bunga kebijakan dari Bank Indonesia telah diturunkan.

Kondisi ini memperlihatkan, kалан bisnis swasta menahan investasi dan menghindari risiko, salah satunya karena ketidakpastian ekonomi dan politik.

Terlebih, menjelang tahun politik 2018-2019 yang berisikan agenda pilkada dan pilpres. Penurunan investasi dalam jangka pendek dapat menghilangkan potensi pendapatan negara dari pajak korporasi. Dalam jangka panjang dapat menurunkan konsumsi masyarakat karena minimnya penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan.

Kelima, sebetulnya pemerintahan Joko

Widodo telah melakukan langkah yang cukup berani dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sayangnya, proyek infrastruktur yang digalakkan berfokus pada penciptaan konstruksi yang dampaknya terasa jangka panjang, tapi membutuhkan pembiayaan besar di masa sekarang. Hal ini menunjukkan, performa investasi pemerintah bergantung pada performa fiskal pemerintah.

Terlebih, dengan adanya sejumlah kecelakaan pada proyek konstruksi menunjukkan adanya perencanaan dan eksekusi proyek yang belum matang. Hal ini semakin mempersulit posisi pemerintah yang ruang fiskalnya terhambat karena sumber pajak yang ketat dan defisit yang tidak boleh mencapai batas yang melangar Undang-Undang.

Pemparan di atas mengungkap, Indonesia tengah mengalami perekonomian bertumbuh namun kecepatannya melambat.

Tanpa kebijakan yang tepat, penurunan kecepatan ini dalam jangka panjang justru dapat menjadi kontraproduktif dengan upaya membangun negaranya.

Namun, upaya tersebut tampaknya saat ini tidak bisa melalui kebijakan fiskal dan moneter, mengingat ruang fiskal atau anggaran negara yang begitu ketat serta kebijakan moneter yang sebenarnya longgar.

Sebetulnya, kalau melihat pemparan masalah, tampaknya pertumbuhan dapat didorong dengan menyediakan pendanaan bagi golongan miskin, sehingga daya belinya meningkat dan secara agregat, konsumsi rumah tangga akan meningkat.

Namun, dari mana sumber pendanaannya? Zakat, sebagai salah satu rukun Islam dapat menjadi alternatif solusi. Selain berdimensi religius, zakat menurut para ulama merupakan instrumen yang dapat berperan meningkatkan perekonomian umat.

Bahkan, sejumlah ekonom Muslim kontemporer menyatakan, zakat adalah semacam disinsentif bagi golongan kaya untuk menyimpan hartanya. Zakat inilah yang akan menjadikan kekayaan tidak menumpuk di golongan berpunya, namun juga menyediakan harapan bagi kaum duafa.

Karena itu, wacana kewajiban zakat oleh pemerintah dimulai dari PNS adalah upaya yang sangat baik dalam rangka menyebarkan sumber perekonomian di dalam negeri.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran bahkan seharusnya mewajibkan seluruh Muslim berpunya untuk berzakat.

Di sisi lain, penguatan sistem tata kelola, basis data, serta sumber daya dari lembaga zakat dan program pendampingan serta pemberdayaan oleh amal menjadi kunci agar zakat secara optimal mendorong kondisi makroekonomi Indonesia yang stagnan. ■

Banjir dan Kearifan Lokal

● RIZA MULTAZAM LUTHFY

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UJI Yogyakarta, Peneliti Desa

Sejumlah desa di berbagai penjuru tengah dilanda bencana alam, terutama banjir. Selain mengakibatkan rusaknya fasilitas publik dan hilangnya harta benda, malapetaka ini juga membuat penduduk desa terluka bahkan meninggal dunia.

Hebatnya, munculnya musibah tidak lantas membuat ikatan orang desa rapuh, melainkan semakin kuat. Dengan konsensus tak tertulis, mereka bahu-membahu menghilangkan rasa sedih, depresi, serta trauma.

Komunalisme membimbing mereka untuk turut serta merasakan penderitaan orang lain. Dengan berbagai perasaan, mereka bermaksud menyelipkan hiburan bagi siapa saja yang tertampar musibah.

Pengalaman sejarah memberikan pelajaran berharga bagi orang desa untuk sebisa mungkin menjaga kebersamaan. Interaksi sosial terjalin dalam kegiatan sehari-hari. Psikologi dan sosiologi perdesaan terbentuk lantaran ketika memperoleh musibah, orang desa menghadapinya dengan bijak.

Kepemimpinan lokal

Bagi masyarakat perdesaan, usaha meringankan penderitaan sesama terlaksana selama ratusan tahun silam. Muncul kebijaksanaan bahwa kesediaan yang menimpa salah satu atau sebagian anggota desa ditanggung oleh semua warga.

Kearifan lokal inilah yang terbukti sanggup menguatkan solidaritas dan kepercayaan di antara mereka. Dengan demikian, ikhtiar mengatasi kesediaan tidak hanya berada di pundak individu, melainkan juga tanggung jawab banyak orang.

Berjalannya kehidupan di desa meniscayakan atensi besar terhadap segala bentuk kenestapaan. Dalam upaya mengusir kesengsaraan, pemimpin memegang amanat yang lebih berat.

Bagi masyarakat Gorontalo, misalnya,

kepemimpinan berdasarkan nilai kearifan *hileia*, yaitu kemampuan kepala desa dalam menanggulangi bala (*dembulo*), seperti kematian, bencana alam, serta musibah lainnya.

Menurut bahasa setempat, *hileia* bermakna *duliolo* atau takziah menghibur keluarga yang berduka. Pemimpin tidak boleh "tebang pilih" saat menyambangi siapa saja yang didera kemalangan. Ia harus memperlakukan semua lapisan masyarakat secara adil dan sederhana.

Selaku warga, setiap orang berhak menerima balaian "kasih sayang" sang pemimpin. Hak mendapat pajuangan dan simpati kepala desa bukan berlandaskan kelas sosial, tetapi bermukimnya individu di suatu tempat.

Dengan demikian, tidak hanya mengatur tata kehidupan desa, menjalankan pelayanan administratif, serta bertanggung jawab kepada pemerintahan di atasnya, kepala desa juga dituntut hadir dalam kesedihan warga.

Di sinilah fungsi dan peran pemimpin lokal diuji. Dalam taraf tertentu, ia bukan hanya terlibat dalam perkara formal-mekanis, tapi juga kultural-psikologis. Ketentuan demikian sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keramahan dan kepedulian pemimpin lokal Gorontalo digenapi dengan kesigapan warga saat mengulurkan bantuan. Para tetangga memindahkan dapur mereka dan memasak berbagai hidangan di rumah keluarga yang tertimpa musibah dengan bergotong-royong.

Hal ini terutama ditemukan dalam kasus kematian. Di samping peralatan dapur, setiap warga membawa pula bahan makanan, semisal beras, sayur, ikan (ayam), serta bumbu dapur sesuai kemampuan masing-masing untuk kemudian dimasak bersama seraya menghibur keluarga yang berduka (Jans Willianto Nasila, 2014: 148).

Membangun kesadaran

Sayangnya, di beberapa tempat, kearifan lokal semacam ini mulai ditinggalkan. Industrialisasi dan gejala mengkota pada desa-desa Indonesia berimbas pada meningkatnya individualisme masyarakat perdesaan.

Kini, orang desa lebih disibukkan dengan urusannya sendiri daripada memperhatikan kepentingan orang lain. Aktivitas berbagai perasaan diwujudkan dengan berkoar di media sosial (*medsos*). Akhirnya, dunia maya menjadi sarana melarikan diri dari realitas.

Apalagi, muncul prediksi pada 2035 mendatang, penduduk desa tinggal 30 persen. Adapun sisanya memilih kota sebagai loka bermukim. Kecenderungan di atas mengindikasikan hilangnya kesadaran tentang desa sebagai akar dan identitas kultural.

Merupakan suatu kebanggaan ketika mereka sanggup mengatrol "status" dari *wong ndeso* menjadi kaum urban. Betapa hari-hari mereka dipenuhi dengan hasrat dan cita-cita urban. Dengan demikian, terjadi pergeseran konsep urbanisasi dari ranah fisik ke ranah psikologis.

Urbanisasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas fisik, tetapi juga paradigma berpikir masyarakat.

Dalam konteks inilah, diperlukan upaya serius semua pihak untuk memupuk kesadaran generasi muda bahwa desa merupakan tempat hunian yang senantiasa menjanjikan kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

Dana desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk membangkitkan perekonomian lokal, sehingga mereka tidak tergiur untuk berburu rupiah di wilayah perkotaan. Apabila kesadaran ini terbangun dengan baik, niscaya prinsip kehidupan leluhur dan nenek moyang tetap diwariskan lintas generasi.

Berbagai wujud kearifan lokal para pendahulu bisa dibangkitkan kembali sebagai sarana meringankan penderitaan korban bencana alam, khususnya banjir. Kearifan lokal yang dimiliki orang-orang desa dapat diadopsi oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar.

Sehingga, upaya membendung derasnya air, tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan gelontoran uang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melainkan juga melalui kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ■